

# Fanatisme Politik Islam: Ideologisasi Partai Ka'bah di Jepara Masa Orde Baru dan Pasca Reformasi

**M Rizal Qasim**

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

*e-mail: m.gosim@uin-suka.ac.id*

## **Abstrak**

Dinamika politik dan parpol Islam di Jepara menunjukkan sebuah transformasi politik yang cukup radikal. Fanatisme politik masyarakat Jepara belakangan semakin luntur. Mereka bisa goyah dengan banyak pilihan politik yang ada. Politik Jepara yang dulunya didominasi warna 'hijau' sekarang mulai dikuasai oleh warna 'merah'. Perubahan ini tentunya menarik untuk diteliti. Hal yang hendak diungkap dari penelitian ini adalah apa faktor yang menyebabkan fanatisme politik di Jepara dan apa faktor yang melahirkan transformasi politik Jepara dari 'hijau' ke 'merah'. Penelitian ini hendak menjawab dua rumusan masalah; apa yang menyebabkan masyarakat muslim Jepara menjadi ideologis dan fanatis terhadap PPP; dan mengapa terjadi pergeseran dari fanatisme PPP menjadi pragmatis dalam berpolitik di Jepara?

**Kata Kunci:** *Fanatisme Politik; Partai Ka'bah; Jepara*

## **Pendahuluan**

Jepara merupakan salah satu kabupaten di kawasan Pantai Utara Jawa (Pantura) yang mempunyai dinamika politik cukup tinggi. Sejak Orde Baru kabupaten Jepara menjadi basis Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Partai ini sejak Orde Baru hingga permulaan Era Reformasi menjadi partai politik yang dominan. Secara ideologis, masyarakat Jepara banyak berafiliasi dengan partai ini alasannya sederhana: karena PPP menjadi representasi partai umat Islam. Di Jepara ormas Islam terbesar adalah Nahdlatul Ulama (NU) kemudian disusul Muhammadiyah. Mayoritas masyarakat Muslim Jepara berafiliasi ke NU. Organisasi ini, seperti kata Jim Schiller, meskipun sering menerima patronase negara yang dimilikinya, namun juga

mempertahankan tingkat otonomi dari negara. Sementara itu, Muhammadiyah, secara kuantitatif tergolong kecil di Jepara.<sup>1</sup>

Pada masa Orde Baru, kehadiran NU yang kuat, mekarnya rasa percaya diri, Non-kroni, elit komersial pribumi di seputar industri mebel, dan keberhasilan Partai yang berbasis di NU, Partai Persatuan Pembangunan yang saat itu menjadi partai terbesar di Jepara dan mempunyai wakil di DPR cukup banyak, lebih mampu menuntut Pemerintah daerah dan mengungkap korupsi pemerintah daerah.<sup>2</sup>

Hal itu terutama di era Orde Baru. Dari ketiga kekuatan politik yang ada saat itu, yakni PPP, Golkar dan PDI, PPP menjadi satu-satunya partai yang merepresentasikan kelompok Islam. dengan alasan agama inilah sebagian besar masyarakat Jepara lebih memilih PPP. Sebab mayoritas masyarakat Jepara beragama Islam. Loyaitas masyarakat Jepara terhadap PPP ini begitu mengakar dan sangat kuat. Karena itulah, di setiap pemilu PPP selalu menjadi pemenang di kabupaten Jepara.

Secara geografis kabupaten Jepara terbagi atas 16 kecamatan, 184 desa dan 11 kelurahan, serta 995 Rw dan 4.686 RT. Daerah pantai terbentang dari sebelah barat hingga ke bagian utara. Sementara daerah dataran rendah terutama dibagian barat dan selatan merupakan bagian terbesar. Dataran tinggi berada di utara dan timur kabupaten Jepara, yang dekat dengan gunung Muria.

Sementara itu secara politik, Partai Persatuan Pembangunan sangat seksi dalam perkembangan politik identitas di jepara, partai persatuan pembangunan (PPP) memiliki basis masa yang besar jauh lebih besar dari partai Islam lainnya, pada pemilu legislatif 2004 partai persatuan pembangunan (PPP) masih menjadi primadona di Jepara dengan meraih sembilan kursi atau 18 suara. Namun di sisi lain, kuatnya loyalitas dan tingginya fanatisme masyarakat terhadap partai, khususnya terhadap PPP, sringkali melahirkan gesekan, bahkan konflik di kalangan masyarakat akar rumput. Ketika Orde Baru rival utama PPP adalah Golkar. Karenanya, para masyarakat pendukung

---

<sup>1</sup> Jim Schiller, "Civil society in Jepara; Fractious but inclusive" dalam (Ed.) Henk Schulte Nordholt and Gerry van Klinken, *Renegotiating Boundaries Local politics in post Soeharto Indonesia*, (Leiden, KITLV Press, 2007), hlm.28.

<sup>2</sup> *Ibid.*,

PPP saat itu, bahkan mungkin sampai sekarang, menaruh kebencian yang luar biasa tinggi terhadap Golkar.

Namun, setelah lahirnya Reformasi yang ditandai dengan maraknya multipartai, maka lahirlah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Ketika PKB ahir, maka 'musuh' utama PPP di Jepara bukan hanya Golkar, tetapi juga PKB. Bahkan resistensinya terhadap PKB lebih keras daripada terhadap Golkar. Sebab massa pendukung PKB kebanyakan berasal dari PPP. Para kiai dan umat Islam yang ketika Orde Baru ada di PPP, ketika PKB lahir, kemudian beralih ke PKB. Fenomena ini, dirasakan oleh para loyalis PPP sebagai bentuk penggembosan terhadap PPP. Maka, PPP dengan seluruh pendukungnya menyerang habis-habisan PKB. PKB-pun tak mau kalah. Mereka berusaha menyerang balik terhadap PPP. Aksi serang-menyerang ini benar-benar menjadi trend di Jepara ketika awal-awal Reformasi. Bisa dikatakan bahwa Jepara saat itu sangat gaduh dengan persoalan politik.<sup>3</sup>

Karena tngginya fanatisme tersebut, dalam sejarah politik di Jepara, sering terjadi gesekan dan konflik antara pendukung PPP versus pendukung PKB. Konflik antar pendukung partai yang sama-sama berbasis pada massa Islam tersebut tak jarang mencapai pada level yang sangat mengerikan karena mengorbankan banyak harta bahkan nyawa. Di awal-awal Reformasi, banyak dijumpai massa PPP berkampanye membawa pedang. Fenomena seperti ini sudah sangat biasa saat itu.<sup>4</sup>

Ketegangan semakin memuncak ketika hampir tiap saat masyarakat Jepara dibakar semangatnya oleh para muballigh atau dai yang lebih banyak memberikan orasi yang membangkitkan rasa kebencian dan permusuhan. Para dai/muballigh ini umumnya berafiliasi dengan PPP. Seringkali para dai atau muballigh tertentu, di awal-awal Reformasi, hampir tiap malam 'memprovokasi' massa PPP di Jepara.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Sebagaimana dikatakan oleh warga Jepara, MQ, pada 20 April 2017

<sup>4</sup> Menurut penuturan salah seorang warga Jepara, ADH pada 20 April 2017

<sup>5</sup> Para da'i atau muballigh ini sering tampil atau berpidato dalam acara-acara pengajian yang diadakan oleh PPP Jepara di berbagai daerah di Jepara. Keterangan ini berdasarkan MM pada 19 April 2017

Salah satu peristiwa berdarah yang sangat memilukan karena terjadinya konflik di Jepara pada awal-awal Reformasi adalah konflik Dongos<sup>6</sup>. Saat itu, 30 April 1999, kurang dari dua bulan menjelang Pemilu 1999, menjadi lembaran hitam bagi sejarah politik di Jawa Tengah khususnya di Jepara. Saat itu, empat orang tewas dan puluhan orang luka dalam konflik berdarah antara massa Partai Kebangkitan Bangsa dan massa Partai Persatuan Pembangunan di Desa Dongos, Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara.

Di dalam konflik tersebut sebagian massa banyak yang membawa senjata semacam pedang, celurit, parang, katapel, dan batu. Massa yang bentrok pun juga merusak dan membakar benda-benda milik penduduk. Paling tidak, dalam beberapa laporan, 15 mobil, 6 sepeda motor, dan 2 rumah warga setempat hangus terbakar.

Pemicu konflik tersebut sebenarnya hal yang tergolong kecil. Saat itu massa Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) berniat mendeklarasikan partai tersebut di ranting Desa Dongos. Massa Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang sebelumnya mengklaim Desa Dongos dan sekitarnya sebagai basis mereka marah besar dan menyerang massa PKB (Kompas, 2/5/1999). Tragedi ini, hingga sekarang menjadi sejarah kelam bagi masyarakat Jepara.

Lambat laun, situasi politik berubah. PPP yang awalnya menjadi partai yang mendominasi Jepara, semakin lama tidak diminati oleh warga Jepara. Hadirnya partai-partai baru, seperti Demokrat dan Gerindra, turut mempengaruhi merosotnya suara PPP di Jepara. Karenanya, meski di awalnya sebagian besar masyarakat Jepara sangat fanatik terhadap PPP, anggapan seperti itu semakin luntur.

Sebab, suara PPP belakangan bukan hanya turun, melainkan telah dikalahkan PDI-P yang di era Orde Baru menjadi parta gurem di Jepara. Hal ini dibuktikan dengan hasil pemilu 2014 kemarin, yang menampilkan PDI-P sebagai partai pemenang di Jepara. PPP yang dulunya mendominasi akhirnya harus 'turun tahta' dalam pertarungan politik di Jepara.

Berdasarkan data yang dihimpun Jaringnews.com (19/04/2014) dari sejumlah sumber, perolehan kursi masing-masing

---

<sup>6</sup> Mengenai informasi tentang konflik Dongos ini sudah terpublikasikan di berbagai media termasuk media online. Untuk informasi lebih lanjut silakan dibaca di berbagai media cetak maupun online

Parpol di Kabupaten Jepara terbanyak diperoleh PDI Perjuangan, yaitu 10 kursi. Berikutnya disusul partai berlambang kabah yang memperoleh 9 kursi. Partai besutan Prabowo Subianto hanya memperoleh 8 kursi.

Sementara itu, partai pendatang baru, Nasdem, berbagi kursi sama dengan PKB, dan Golkar. Masing-masing memperoleh 5 kursi. Partai berlambang matahari, PAN, hanya memperoleh 3 kursi. Sedangkan Partai Demokrat dan PKS masing-masing hanya memperoleh 2 kursi.

Partai yang tak memiliki wakil di legislatif yaitu PBB dan PKPI. Dalam Pileg pekan kemarin, PBB hanya memperoleh 1.847 suara. Sedangkan PKPI memperoleh oleh suara 2.084. Partai yang mengusung Capres-Cawapres Wiranto-Harytanoe masih beruntung memperoleh 1 kursi.

Dari data tersebut menunjukkan sekarang ada sebuah transformasi politik yang cukup radikal. Fanatisme politik masyarakat Jepara belakangan semakin luntur. Mereka bisa goyah dengan banyak pilihan politik yang ada. Politik Jepara yang dulunya didominasi warna 'hijau' sekarang mulai dikuasai oleh warna 'merah'. Perubahan ini tentunya menarik untuk diteliti. Hal yang hendak diungkap dari penelitian ini adalah apa faktor yang menyebabkan fanatisme politik di Jepara dan apa faktor yang melahirkan transformasi politik Jepara dari 'hijau' ke 'merah'.

### **Penyebab masyarakat Muslim Jepara menjadi ideologis dan fanatis terhadap PPP**

Kabupaten Jepara merupakan daerah pesisir. Tempat kelahiran RA. Kartini ini mempunyai banyak pantai dan sebagian penduduknya bekerja sebagai nelayan. Secara geografis, wilayah Kabupaten Jepara terletak pada posisi 3° 23'20" sampai 4° 9'35" Bujur Timur sampai 6° 47' 44" Lintang Selatan.<sup>7</sup> Wilayah Kabupaten Jepara, di sebelah barat dan utara berbatasan dengan laut Jawa, di bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Kudus dan Pati dan di wilayah

---

<sup>7</sup> Suyami, *Kearifan Lokal di Lingkungan Masyarakat Nelayan Jepara Jawa Tengah*, (Yogyakarta: kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, 2002), hlm. 7.

selatan berbatasan dengan Kabupaten Demak.<sup>8</sup> Secara sosiologis-antropologis, masyarakat Jepara tergolong sebagai masyarakat religius yang cukup fanatis terhadap agama.

Mayoritas warga Jepara beragama Islam dan lebih banyak berafiliasi dengan organisasi Nahdlatul Ulama. Dalam tipologi keagamaan ini, masyarakat Islam Jepara lebih banyak didominasi oleh kultur “Islam tradisional”.<sup>9</sup> Maka, di daerah ini, banyak tradisi-tradisi Islam yang berjalan sebagaimana yang umumnya berlaku di kalangan muslim tradisional seperti ziarah kubur, mauludan, manaqiban, dzibaan, tahlilan dan seterusnya.

Secara politik, masyarakat Jepara masih banyak yang menjadikan agam (baca: Islam) sebagai pertimbangan utama. Dalam hal memilih pemimpin atau memilih partai politik misalnya, variable agama masih sangat kuat dijadikan pegangan. Karena itu, simbol-simbol agama dan hal-hal yang merepresentasikan keislaman, seperti Tuhan, surga, neraka, figur kiai, praktek-praktek keagamaan, pondok pesantren, ritus-ritus keagamaan dan sebagainya turut menjadi

---

<sup>8</sup> Muhammad Muhibbuddin, R.M.P. *Sosrokartono:Kisah Hidup dan Ajaran-Ajarannya*, (Yogyakarta: Araska,2019), hlm.10.

<sup>9</sup> Perlu digarisbawahi di sini bahwa Islam tradisional yang dimaksud di sini bukanlah Islam Wahhabi, melainkan Islam yang justru bersebrangan dengan Wahhabi. Sebab, dalam konteks Indonesia, khususnya di Jepara, Islam tradisional yang sebagian besar terwadahi dalam organisasi Nahdlatul Ulama (NU) justru menjadi antithesis dari gerakan Wahhabi. Penegasan ini perlu dilakukan di sini sebab dalam beberapa literatur disebutkan bahwa apa yang disebut dengan Islam tradisional (*tradisionalis*) adalah gerakan Islam yang dipelopori oleh gerakan Wahhabi. Clinton Bennet misalnya dalam bukunya *Moslem and Modernity: An Introduction to the Issues and Debates* dengan merujuk kepada beberapa sarjana menjelaskan bahwa Islam tradisional merupakan Islam yang dipelopori dan didirikan oleh Muhammad bin Abdul Wahhab (1703-92). Sebagaimana diketahui secara umum bahwa Muhammad bin Abdul Wahhab, yang para pengikutnya berhasil mendirikan negara Arab Saudi modern, hendak membangkitkan kemurnian Islam. Islam bagi kalangan Wahhabi ini harus dibersihkan dari segala macam inovasi (dalam bahasa agamanya *bid'ah*) sebagaimana yang nampak kental dalam dunia tasawuf. Karenanya, gerakan Wahhabi ini menolak tasawuf karena dianggap penuh dengan *bid'ah*. Adapun secara politik, Islam tradisional ala Wahhabi ini, kata Bennet mendukung pemerintahan autokratis asalkan pemerintahan itu menerima otoritas al-Qur'an dan Sunnah. Lihat selengkapanya, Clinton Bennet, *Moslem and Modernity: An Introduction to the Issues and Debates*, (London and New York: Continuum, 2005), hlm.18.

kekuatan utama dan mempunyai pengaruh besar dalam praktek politik di Jepara. Partai-partai politik yang ada di Jepara, kemudian cenderung menjadikan agama sebagai alat untuk menarik simpati masyarakat.

Membangun kesan religius (Islam) menjadi salah satu strategi penting untuk menggaet dukungan masyarakat. Ikatan emosional terhadap Islam menjadi basis utama dalam pilihan politik di Jepara. Ketika disodorkan beberapa pilihan partai politik atau calon pemimpin (baik di eksekutif maupun legislatif) maka pertimbangan utama yang dijadikan dasar masyarakat Jepara untuk menentukan pilihannya adalah soal agama. Masyarakat akan mudah tertarik dengan parpol atau sosok yang menampilkan wajah keislaman. Namun jika sejak awal sebuah partai politik atau sosok calon pemimpin sudah dikesankan sekuler atau jauh dari nilai-nilai Islam, maka partai atau sosok tersebut akan sulit mendapatkan dukungan dari masyarakat luas.

Singkatnya, agama (Islam) menjadi basis kekuatan politik di Jepara.<sup>10</sup> Salah satu konsekuensinya, para politisi atau partai politik, tidak bisa lepas dari tokoh-tokoh Islam, terutama dari para kiai, gus, ustadz dan pengurus NU atau pengurus Muhammadiyah. Tentu saja ada sebagian masyarakat Jepara yang menentukan pilihan politiknya tidak lagi berdasarkan pada ikatan emosional keagamaan, melainkan lebih pada profesionalitas, *track record*, dan integritas dari calon atau partai politik. Kelompok inilah yang disebut dengan pemilih rasional. Namun jumlah pemilih rasional ini, di Jepara, prosentasenya masih belum banyak. Umumnya masyarakat Jepara masih di dominasi emosi keagamaan dalam menentukan pilihan politiknya, hal ini terutama masyarakat pedesaan.

Dengan tipologi politik yang seperti itu, maka PPP Jepara sejak Orde Baru menjadikan isu-isu keislaman sebagai sebagai platform politiknya. Melalui isu-isu keagamaan yang dimainkannya, PPP sejak Orde Baru menjadi partai kuat di Jepara. Partai ini dipandang masyarakat Jepara sebagai partai yang merepresentasikan Islam. Mayoritas masyarakat Jepara yang sejak awal sangat fanatik

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan: M.Latifun (anggota DPRD Jepara dan pimpinan DPC Partai Demokrat Jepara); Nuruddin Amin (Wakil ketua DPRD Jepara dan ketua DPC PKB Jepara); Abdul Wahab (ketua LDNU Jepara) dan Muslih (tokoh senior PPP).

terhadap Islam kemudian menjadi fanatik terhadap parpol berbasis Islam, PPP, sebab PPP dipandang sebagai satu-satunya partai Islam. Masyarakat Jepara yang mayoritas fanatik terhadap Islam kemudian memilih jalur politiknya melalui PPP, karena partai-partai yang lain di masa Orde Baru itu (Golkar dan PDI) dinilai sebagai partainya kaum abangan, kaum sekuler atau kaum yang jauh dari agama.<sup>11</sup>

Waktu itu perjuangan politik masyarakat Islam di Jepara melalui PPP kemudian juga banyak dipimpin oleh kiai-kiai pesantren, dan karena adanya hubungan patronase yang kuat antara kiai dengan umatnya, maka masyarakat Jepara juga banyak yang turut ikut memilih PPP dengan dasar *sami'na wa atho'na sama kiai*.<sup>12</sup> Karena begitu fanatiknya terhadap PPP, maka sebagian besar warga Jepara yang menjadi pendukung PPP, nyaris tidak mampu membedakan Islam itu sendiri dengan PPP sebagai partai Islam; seolah Islam dan PPP diposisikan sama; di mana partai yang sesungguhnya produk duniawi kemudian turut diimani sebagaimana mengimani agama itu sendiri.<sup>13</sup>

Soal PPP yang diimani sebagai partai Islam itu, hal ini tercermin dari pernyataannya tokoh senior PPP, Muslih yang ketika ditanya kenapa dirinya dan warga Islam Jepara secara umum sejak Orde Baru sangat fanatic terhadap PPP, ia dengan lugas menjawab:

*“Lha PPP kui kan partai Islam. Disek iku kan PPP juga lahir ko NU yo karo masyumi. Jadi PPP sejak dulu itu memang menjadi kendaraan politik orang Islam. Tidak banya di Jepara, bahkan sejawa kebanyakan orang itu masuk PPP”.*(*Lha itu kan partai Islam. Dulu itu kan PPP juga lahir dari NU dengan Masyumi. Jadi PPP sejak dulu memang menjadi kendaraan politik orang Islam. Tidak banya di Jepara, bahkan sejawa orang Islam itu masuk PPP*).<sup>14</sup>

Dengan pernyataan seperti itu, maka Islam saat itu dalam konteks politik Jepara telah mengkristal menjadi sebuah ideologi. Padahal semua tahu bahwa di masa Orde Baru, semua partai politik menggunakan asas tunggal: Pancasila. Tidak ada partai politik bahkan

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan Andang Wahyu Triyanto, Ketua DPC PDI-P Kab. Jepara dan Anggota DPRD Jawa Tengah (17/10/2019).

<sup>12</sup> *Ibid.*,

<sup>13</sup> Wawancara dengan Zainal Arifin, Rais Syuriah NU Ranting Desa Sekuro-Mlonggo (17/10/2019).

<sup>14</sup> Wawancara dengan Muslih tokoh senior PPP (16/10/2019).

organisasi keagamaan semacam NU dan Muhammadiyah di masa Orde Baru yang secara formal berasaskan Islam. Semua partai dan ormas di masa itu dipaksa oleh rezim Orde Baru untuk menggunakan Pancasila sebagai dasar organisasinya.<sup>15</sup> PPP di zaman Orde Baru karenanya secara formal juga merupakan partai politik yang berasaskan Pancasila. Namun, masyarakat di Jepara, tetap memandang PPP tetap dalam kerangka ideologis di mana bagi mereka PPP tetaplah partai (umat) Islam. Sebab, hal ini tidak bisa dilepaskan dari latar belakang sejarah kelahiran PPP sendiri yang merupakan penggabungan (fusi) secara paksa oleh rezim Orde Baru dari partai-partai Islam saat itu (NU, Parmusi, PSII dan Perti), sementara di sisi lain PDI merupakan penggabungan dari lima partai nasionalis dan Kristen (PNI, Parkindo, Partai Katolik, IPKI dan Murba).<sup>16</sup> Jadi, sebagai peleburan partai-partai Islam yang dipaksakan oleh Orde Baru inilah, PPP kemudian tetap dipandang dan diyakini sebagai representasi Islam, termasuk oleh masyarakat Islam Jepara, meski secara formal dasarnya Pancasila.

Di masa Orde Baru itu sendiri, hampir semua masyarakat Islam Jepara menganggap PPP sebagai sebuah representasi ideologi, sehingga kalau yang dijual sudah masalah ideologi maka sangat laku.<sup>17</sup> Waktu Orde Baru itu di Jepara, masyarakat Islam baik NU dan Muhammadiyah wadah politiknya adalah PPP.<sup>18</sup> Fanatisme masyarakat Jepara terhadap Islam, dalam perkembangannya kemudian ditransformasikan menjadi fanatisme partai politik oleh para politisi PPP. Disinilah letak bagi terjadinya proses ideologisasi Islam ke dalam

---

<sup>15</sup> Seperti dijelaskan Andrée Feilard, pada tahun 1980, Presiden Soeharto, yang saat itu kekuasaannya sudah sangat kuat dan cenderung diktator, menegaskan bahwa pemerintah memprioritaskan Pancasila di atas semua ideologi dan agama. Tanggal 27 Maret 1980, dalam sebuah pidatonya di Pekanbaru, Presiden mengumumkan rencana penyatuan ideologis. Menurut Presiden, sejak awal berdirinya Orde Baru sudah ada consensus untuk memperjuangkan agar “semua partai politik atau Golongan Karya mendasarkan diri pada satu ideologi yaitu Pancasila”. Lihat laporan Andrée Feilard, *NU vis-à-vis Negara: Pencarian Isi, Bentuk dan Makna*, (Terj.), Lesmana, (Yogyakarta: LKiS, 2013), hlm.213

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm.155

<sup>17</sup> Wawancara dengan Nuruddin Amin (Wakil ketua DPRD Jepara dan ketua DPC PKB Jepara) (16/10/2019)

<sup>18</sup> *Ibid*

politik yang terjadi di Jepara. Sehingga masyarakat Islam di Jepara di zaman Orde Baru memilih PPP benar-benar didasarkan pada semangat ideologis: Islam. Di masa itu, di Jepara, produk politik yang berlabel ideologi Islam, sangat laku di pasaran.

Tentu ada banyak pola dan cara yang dilakukan oleh para eksponen PPP untuk menanamkan ideologi ke dalam pikiran masyarakat. Salah satunya adalah melalui aksi indoktrinasi. Masyarakat Jepara, dengan karakternya yang sangat fanatik terhadap agama, sangat sangat kuat keyakinan keagamaannya sehingga apapun doktrinnya, kalau dibungkus dengan hal-hal berbau agama akan mudah dikendalikan dan diraih simpatinya.<sup>19</sup> Pola indoktrinasi politik yang dibungkus agama ini masih terus berlangsung secara massif ketika awal-awal Reformasi 1998, masa ketika PPP merubah simbolnya dengan gambar Ka'bah. Di masa-masa tumbanganya Orde Baru dan awal-awal Orde Reformasi ini salah satu 'jargon' atau semboyan yang sering dipakai oleh para politisi PPP biasanya adalah "*nek pengen mlebu suargo ya kudu madep kiblat*" (kalau ingin masuk surga ya harus menghadap kiblat).<sup>20</sup>

Hal itu terkait dengan simbol PPP yang baru saat itu yaitu Ka'bah yang dalam Islam merupakan kiblat sholatnya umat Islam. Dalam setiap kampanyenya, PPP senantiasa membawa nama Tuhan sehingga membuat masyarakat Islam Jepara terdoktrin dan fanatis terhadap partai PPP karena mereka beranggapan kalau tidak mengikuti PP, mereka tidak akan masuk surga.<sup>21</sup> Dengan pola-pola indoktrinasi seperti itu, kata M. Latifun, masyarakat Islam Jepara lalu mudah sekali terpengaruh untuk menjadi simpatisan PPP, bahkan dengan menunjukkan performa politik yang cenderung radikal dan fanatik.<sup>22</sup>

Bagaimana kemudian bentuk dan dampak fanatisme masyarakat Islam Jepara yang menjadi simpatisan PPP itu? Fanatisme politik ini

---

<sup>19</sup> Wawancara dengan M. Latifun, anggota DPRD Jepara dan pimpinan DPC Partai Demokrat Jepara (16/10/2019).

<sup>20</sup> *Ibid*

<sup>21</sup> Wawancara dengan Abdul Wahab, Ketua PC LDNU Kab. Jepara (18/10/2019)

<sup>22</sup> Wawancara dengan M. Latifun, anggota DPRD Jepara dan pimpinan DPC Partai Demokrat Jepara (16/10/2019).

membawa dampak yang sangat serius, terutama terhadap kohesi sosial masyarakat Jepara. Jangankan dengan golongan atau kelompok non-Muslim. Semangat fanatisme politik yang dibungkus dengan agama itu memicu terjadinya ketegangan dan konflik antar kelompok masyarakat bahkan terhadap sesama umat Islam sendiri yang berbeda partai. Ketika Orde Baru masih berkuasa, masyarakat Islam Jepara yang menjadi pendukung PPP lebih banyak berkonflik dengan pendukung Golkar. Pada saat itu, Golkar telah diposisikan sebagai musuh bebuyutan oleh para pendukung PPP.

Di setiap musim pemilu, selalu terjadi rivalitas dan ketegangan antara pendukung PPP dan Golkar. Dalam konflik horisontal ini, fanatisme terhadap PPP ternyata terlihat lebih kuat dibandingkan dengan fanatisme terhadap Islam itu sendiri. Sebab, dalam kenyataannya, ketika ada kelompok umat Islam yang mendukung partai lain, misalnya mendukung Golkar atau PDI, maka kelompok umat Islam yang ada di PPP akan memandang mereka sebagai rival atau musuh politik. Meskipun jelas sama-sama beragama Islam, jika partainya berbeda, maka ikatan mereka sesama umat Islam menjadi terputus. Ini artinya bahwa fanatisme terhadap partai politik luar biasa kuat di kalangan pendukung PPP. Yang mereka pandang bukan lagi Islam atau NU, melainkan partai politik. Keislaman dan ke-NU-an seseorang dipandang kurang “valid” bagi pendukung PPP jika afiliasi politiknya tidak kepada PPP. Maka wajar jika di era Orde Baru hingga awal-awal Reformasi sesama umat Islam bahkan sesama warga NU di Jepara banyak terlibat konflik dan ketegangan karena perbedaan pilihan politik.

Prinsip yang digunakan oleh simpatisan PPP saat itu adalah mati-hidup ikut PPP. Warga masyarakat PPP Jepara di zaman Orde Baru itu, seperti dikatakan oleh Muslih:

“Yo wes pokoke mati urep koyo-koyo PPP. Seng kiai kui nek karo partai liane akeh seng ngomong keras. Mesti menjelek-jelekan partai lain di panggung-panggung PPP. Lha kalau yang orang biasa, mendengar pengajian di manapun pasti dilacak. Aku dulu ya begitu. Pas waktu kampanye, bisa berhari-hari tidak pulang karena menyuarakan PPP dan mencari anggota tambahan”. (Ya pokoknya seolah-olah mati-urip PPP. Yang kiai itu sama partia lainnya banyak yang ngomong keras. Pasti menjelek-jelekan partai lain di panggung-panggung PPP. Lha kalau orang biasa, mendengar pengajian di manapun pasti dilacak. Aku dulu ya begitu. Ketika musim kampanye,

bisa berhari-hari tidak pulang karena menyuarakan PPP dan mencari anggota [pendukung] tambahan).<sup>23</sup>

Tingkat loyalitas dan fanatisme yang sedemikian kuatnya, menjadikan PPP seolah menjadi partai sakral bagi para pendukungnya di Jepara. Tentu saja fanatisme yang begitu kuat seperti juga disebabkan oleh kebikana rezim Orde Baru saat itu yang sangat bias dan tidak adil. Selama berkuasa, rezim Orde Baru lebih memanjakan Golkar yang merupakan mesin politiknya. Orang-orang atau kelompok masyarakat yang diketahui tidak mendukung Golkar, maka akan dianaktirikan terutama dalam soal pembangunan infrastruktur. Jepara di zaman Orde Baru termasuk daerah yang agak terbelakang dari sisi pembangunannya karena daerah ini dikenal sebagai basis PPP.<sup>24</sup> Banyak kampung yang tidak teraliri listrik, banyak jalan-jalan yang tidak diaspal, gedung sekolah yang sangat memprihatinkan dan sebagainya.

Sebaliknya daerah-daerah yang menjadi basis Golkar, pembangunan infrastrukturnya bagus. Karenanya, di masa Orde Baru itu, berdasarkan pengalaman yang ada di Jepara, ketimpangan benar-benar sangat mencolok antara daerah-daerah yang menjadi basis Golkar dengan daerah-daerah yang menjadi basis PPP atau PDI.<sup>25</sup> Bahkan seringkali terjadi bahwa ketika musim pemilu datang, tong-tong aspal disebar di berbagai perempatan desa. Namun ketika habis penghitungan suara dan terbukti bahwa desa itu lebih banyak memilih PPP, maka tong-tong aspal itu langsung diangkut kembali.<sup>26</sup> Dengan kebijakan rezim Orde Baru yang timpang seperti ini, maka sesungguhnya turut mempertebal rasa fanatisme masyarakat Islam Jepara untuk mendukung PPP. Ketimpangan itu pula yang kemudian memperuncing konflik dan permusuhan antara pendukung PPP dengan pendukung Golkar. Setiap kali ada orang Islam yang mendukung Golkar, entah itu kiai, tokoh masyarakat, pejabat, atau warga biasa, maka oleh warga PPP Jepara akan dipandang sebagai

---

<sup>23</sup> Wawancara dengan Muslih, tokoh senior PPP (16/10/2019).

<sup>24</sup> Wawancara dengan MM (19 April 2017)

<sup>25</sup> Wawancara dengan ADH (20 April 2017)

<sup>26</sup> Wawancara dengan MM (19 April 2017).

pengkhianat umat Islam, atau jika tidak, umat Islam yang mendukung Golkar itu akan dituduh sebagai antek penguasa.<sup>27</sup>

Bisa dipastikan bahwa stereotip itu bukan hanya berlaku bagi para pendukung Golkar di Jepara, melainkan di daerah-daerah lain di Indonesia. Di masa itu, umat Islam, apalagi kiai atau ustadz, yang mendukung Golkar atau PDI, akan langsung dikesankan buruk. Meski demikian, karena ditopang oleh pemerintah dan kekuasaan yang sangat kuat, Golkar tetap kuat secara nasional. Bahkan paska Reformasi, Golkar yang saat itu sudah merubah dirinya sebagai partai (Partai Golkar) masih cukup kuat. Pada pemilu 2004 misalnya Partai Golkar menjadi salah satu partai pemenang Pemilu dengan kemenangan mencapai 21,4 % atau sekitar 24,5 juta suara jika dibandingkan dengan partai Demokrat yang hanya 7,5 % atau sekitar 8,5 juta suara.<sup>28</sup>

Dengan kondisi seperti itu, maka di zaman Orde Baru bahkan di awal-awal Reformasi banyak juga fenomena anggota masyarakat Jepara yang memutuskan hubungan dengan para kiai atau gurunya hanya karena sang kiai atau sang guru turut mendukung Golkar, dan bukannya mendukung PPP. Bahkan tak sedikit pula santri yang mulai menilai miring terhadap kiai panutannya ketika kiaiinya itu keluar dari PPP dan bergabung dengan partai lain seperti Partai Golkar atau PKB. Santri atau masyarakat menjadi tidak lagi hormat kepada para kiai ketika diketahui kiaiinya itu tidak lagi berada di PPP. Kalau terhadap kiai saja mereka sudah tidak lagi hormat, maka apalagi terhadap sesama anggota masyarakat atau sesama santri. Tak jarang hanya karena perbedaan partai politik, orang PPP terhadap sesamanya atau saudaranya mudah memandang sebagai musuh bebuyutan yang tak lebih dari seekor binatang. Sebagaimana dituturkan Zainal Arifin:

*“Dulu sebelum ada PKB, orang-orang PPP memanggil Kiai Amin Sholih (Kiai karismatik dari Bangsri---pen) dan Kiai Sabil (Kiai karismatik dari Sinanggul, Mlonggo----pen) dengan sebutan ta’dzim, Kiai Amin, Kiai Sabil. Tapi semenjak ada PKB dan beliau berdua masuk PKB, masa fanatik PPP sudah nggak mau panggil Mbah Yai Amin atau*

<sup>27</sup> Wawancara dengan Zainal Arifin, Rais Syuriyah NU Ranting Desa Sekuro-Mlonggo (17/10/2019)

<sup>28</sup> Firmanzah, *Persaingan, Legitimasi Kekuasaan dan Marketing Politik: Pembelajaran Politik Pemilu 2009*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2010), hlm.115.

*Mbah Yai Sabil, tapi “Kek Amin” atau “Kek Sabil”...Lha kalo sama orang PKB, orang PPP itu bilangnye mereka orang munafik, kafir wes macem-macem. Bahkan bisa bilang “Asu, Kirik, Celeng”.*<sup>29</sup>

Ungkapan-ungkapan kebinatangan seperti “Asu/Kirik” (Anjing) atau “Celeng” (Babi), juga banyak diungkapkan oleh para dai-dai yang berafiliasi dengan PPP. Hal ini sangat kentara dan massif paska runtuhnya Orde Baru. Di tahun 1998-2002, para dai atau muballighn yang berafiliasi dengan PPP banyak melontarkan hujatan kepada para kiai dan umat Islam yang berafiliasi dengan PKB dengan menggunakan kata-kata kasar seperti “Asu”, “Celeng” dan sebagainya.<sup>30</sup> Hampir setiap pengajian yang digelar oleh PPP di Jepara selalu mendatangkan dai-dai atau muballigh-muballigh yang berani melaontarkan hujatan-hujatan kasar tersebut terhadap para warga PKB atau Golkar.<sup>31</sup>

Para dai, penceramah atau ustadz yang berani melintarkan hujatan-hujatan kasar terhadap para kiai dan warga PKB tersebut semakin menjadi primadona di Jepara. Masyarakat Jepara saat itu, yang memang mayoritas pendukung PPP, hampir tiap malam menggelar pengajian atas nama PPP dengan mendatangkan para dai, ustadz dan penceraman yang provokatif tersebut.<sup>32</sup> Sebenarnya kegiatan ini bukan pengajian, melainkan kampanye karena isinya semuanya adalah politik dan hujatan terhadap mereka yang di luar PPP.<sup>33</sup>

Rivalitas yang dipicu oleh fanatisme politik oleh warga PPP di Jepara ini benar-benar mengoyak ikatan solidaritas sosial. Bukan hanya antara warga masyarakat atau santri dengan kiai, atau antara kiai dengan kiai, melainkan juga antara sesama tetangga. Banyak warga yang sesama tetangga menjadi tidak akur bahkan saling bermusuhan, *tukar padu*, bahkan kontak fisiuk hanya karena perbedaan partai politik. Jika

---

<sup>29</sup> Wawancara dengan Zainal Arifin, Rais Syuriah NU Ranting Desa Sekuro-Mlonggo (17/10/2019).

<sup>30</sup> Wawancara dengan MM (19 April 2017).

<sup>31</sup> *Ibid*,

<sup>32</sup> *Ibid*,

<sup>33</sup> Wawancara dengan warga Jepara, MQ (20 April 2017)

Si A itu berpartai PPP lalu tetangga dektanya, Si B, itu partainya PKB atau Golkar, maka sudah pasti tidak akan akur.<sup>34</sup>

Sesama anggota keluarga pun bisa pecah jika berbeda pilihan politik. Adik sama kakak bisa bertengkar gara-gara pilihan pilitik. Bahkan anak bisa bertengkar sama orangtua karena mungkin orang tuanya fanatik PPP tapi anaknya netral atau nggak ngurusi partai.<sup>35</sup> Ada sebuah kasus di mana seorang sangat fanatik dengan PPP dan menjadi salah satu anggota persatuan Perempuan PPP. Sementara itu, salah satu putranya saat itu adalah simpatisan PKB. Karena anaknya menjadi simpatisan PKB, maka sang ibu tadi marah sekali dan tidak membolehkan pulang ke rumah jika putranya itu masih menjadi simpatisan PKB.<sup>36</sup> Bahkan yang lebih memprihatinkan lagi orang berumah tangga saat itu bisa pisah karena perbedaan partainya beda, yang satu PPP dan yang satunya lagi PKB.<sup>37</sup>

Konflik horizontal antara PPP dan PKB yang paling memilukan itu adalah ketika terjadi peristiwa Dongos pada tahun 1999, di mana peristiwa naas ini terjadi konflik fisik antara simpatisan PPP versus PKB.<sup>38</sup> Bentrokan antara pendukung PPP versus PKB ini terjadi di Desa Dongos, tepatnya terjadi pada tanggal 30 April Tahun 1999 yang bermula ketika masa PKB yang semula niat menggelar pengajian sekaligus deklarasi partai PKB ranting Desa Dongos. Desa Donggos yang merupakan desa dengan basis masa PPP marah dan menyerang masa PKB, akibat tuntutan dari bentrokan ini

---

<sup>34</sup> Wawancara dengan Zainal Arifin, Rais Syuriyah NU Ranting Desa Sekuro-Mlonggo (17/10/2019).

<sup>35</sup> *Ibid*

<sup>36</sup> Wawancara dengan Abdul Wahab, Ketua PC LDNU Kab. Jepara (18/10/2019)

<sup>37</sup> Wawancara dengan M. Latifun, anggota DPRD Jepara dan pimpinan DPC Partai Demokrat Jepara (16/10/2019).

<sup>38</sup> Wawancara dengan Andang Wahyu Triyanto, Ketua DPC PDI-P Kab. Jepara dan Anggota DPRD Jawa Tengah (17/10/2019); Wawancara dengan M. Latifun, anggota DPRD Jepara dan pimpinan DPC Partai Demokrat Jepara (16/10/2019).

menewaskan beberapa orang dan puluhan orang lainnya luka-luka dan sejumlah rumah penduduk juga terbakar.<sup>39</sup>

PPP sebagai partai terbesar di Jepara saat itu oleh sebagian masyarakat Jepara dipandang sangat menakutkan. Sebab, banyak laska-laskar PPP yang waktu itu bertindak kejam terhadap warga Non-PPP, terutama terhadap PKB. Sebenarnya pihak yang dimusuhi oleh warga PPP ini bukan hanya PKB, melainkan partai-partai lain seperti Golkar dan PDI-P. PPP itu bahkan menganggap orang PDI sebagai titisan PKI, titisan komunis.<sup>40</sup> Namun serangan paling keras memang banyak dialamatkan ke PKB karena dengan alasan PKB termasuk partai besar di Jepara dan kedua basis utama PKB juga sama dengan basis utama PPP yaitu umat Islam dan warga NU.

Sejumlah orang mengisahkan bahwa para laskar PPP di Jepara yang dulu ketika kampanye atau pawai banyak yang membawa senjata tajam, terutama pedang. Di antara laskar PPP Jepara yang waktu itu dikenal beringas dan mudah bertindak kejam adalah Sadigo (Salah Dikit Gorok/Salah Dikit Gundul), Labaika, Ababil dan yang lainnya. Laskar-laskar PPP ini dikenal sangat mengerikan sebab jika ada kelompok yang terang-terangan menghina PPP pasti mereka akan menghunuskan pedangnya.<sup>41</sup>

Kekerasan yang ditunjukkan oleh simpatisan PPP ini menimpa mereka. Seperti dikisahkan oleh sejumlah warga Jepara bahwa pernah terjadi aksi kekerasan antar sesama simpatisan PPP ketika PPP Jepara dilanda perpecahan karena pemilihan bupati Jepara pada 1999. Pada masa itu dalam tubuh PPP ada dualisme kelompok. Pada pemilihan bupati tahun 1999 itu, PPP mencalonkan Masykuri Rosyid (ketua PPP Jepara saat itu) sebagai bupati. Namun kubu PPP Jepara lainnya memandang bahwa ada semacam pengkhianatan yang dilakukan Masykuri Rosyid, sebab atas dasar kesepakatan politik di kalangan internal PPP Jepara, Masykuri seharusnya mengalah dan mendukung

---

<sup>39</sup> Akhsin Muktasim, Purwoko dan Muhammad Adnan, *Turunnya Suara Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Jepara*, dalam <https://media.neliti.com> (14/11/2019)

<sup>40</sup> Wawancara dengan Andang Wahyu Triyanto, Ketua DPC PDI-P Kab. Jepara dan Anggota DPRD Jawa Tengah (17/10/2019)

<sup>41</sup> Wawancara dengan Andang Wahyu Triyanto, Ketua DPC PDI-P Kab. Jepara dan Anggota DPRD Jawa Tengah (17/10/2019)

kader PPP yang lain. Karena perpecahan ini, ada seorang kiai di desa Ragu Lampitan, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara, dibunuh oleh kelompok kiai dari desa Lebak yang berbeda kelompok itu.

Jadi di masa Orde Baru dan awal-awal Reformasi banyak benturan antar masyarakat bahkan pertarungan nyawa akibat fanatisme politik yang ditunjukkan oleh simpatisan PPP ini. Bahkan ada ada juga yang berhadapan dengan aparat keamanan (Polisi dan TNI). Saat ada PKB yang sama-sama representasi partai Islam pun juga tidak bisa begitu saja diterima oleh PPP, sebab doktrin politik PPP yang sudah tertanam kuat masih terpatrit di masyarakat oleh kiai-kiai PPP. Hal ini masih ditambah bahwa dulu, PKB dideklarasikan oleh Gus Dur sebagai partai terbuka, tidak khusus untuk orang Islam.<sup>42</sup>

Karenanya, di Jepara saat itu semakin kuat tertanam dalam jiwa para simpatisan PPP bahwa Partai Islam tentunya hanya PPP.<sup>43</sup> Hal ini kata Nuruddin Amin sama dengan masa Orde Lama ketika perpindahan arus politik di masa Masyumi. Dulu, waktu Orde Lama muncul pandangan bahwa partai Islam hanya Masyumi, bukan PPP. Sehingga ketika PPP muncul di masa Orde Baru, partai ini tidak mudah diterima oleh masyarakat Islam.<sup>44</sup>

Di Jepara pada masa Reformasi, karena fanatisme yang sudah begitu berakar, maka meski dalam kenyataannya ada sejumlah partai yang berasaskan Islam, seperti PKS atau PBB, atau partai yang sama-sama berbasis pada massa Islam seperti PKB atau PAN, komunitas Islam di Jepara sebagian besar tetap berpandangan bahwa hanya PPP yang merupakan partai Islam atau partainya umat Islam. Dengan fanatisme ini, tidak mudah untuk mempengaruhi kelompok Islam yang telah menjadi simpatisan PPP untuk pindah partai lain meski ke sama-sama partai Islam atau partai yang berbasis umat Islam.

---

<sup>42</sup> Wawancara dengan Nuruddin Amin (Wakil ketua DPRD Jepara dan ketua DPC PKB Jepara) (16/10/2019).

<sup>43</sup> *Ibid*

<sup>44</sup> *Ibid*

## **Pergeseran fanatisme PPP menjadi pragmatis dalam berpolitik di Jepara**

Seiring dengan berlalunya waktu, situasi politik di Jepara pun mulai berubah. Hadirnya partai-partai baru yang terus terjadi di hampir tiap musim Pemilu, turut mempengaruhi pergeseran politik masyarakat Jepara. Salah satu dampak dari perubahan ini adalah mulai berkurangnya dominasi kekuatan PPP di Jepara. Di Pemilu 2014 misalnya, kedudukan PPP sebagai pemenang Pemilu di Jepara digeser oleh PDI-P.

Namun jika dilihat dari perjalanan sejarahnya dari 1999, suara PPP di Jepara cenderung menurun. Tahun 1999, bisa dikatakan sebagai tahun keemasan PPP Jepara. Pada pemilu 1999, PPP di Jepara mendapatkan 40,36% suara dan memperoleh 18 kursi, selanjutnya pada pemilu tahun 2004, perolehan suara PPP turun menjadi 31,69% dengan mendapat 14 kursi, pada pemilu 2009, suara PPP Jepara turun lagi sehingga menjadi 15,74% dengan mendapatkan 9 kursi, dan pada tahun 2014 PPP meskipun suara naik, mendapat suara 18,94% namun perolehan suaranya tetap, 9 kursi.<sup>45</sup>

**Tabel Perolehan suara dari pemilu 1999 hingga pemilu 2014**

No	PPP	Pemilu 1999	Pemilu 2004	Pemilu 2009	Pemilu 2014
1	Perolehan Suara	230.098	177.694	81.465	120.990
2	Prosentase	40.36 %	31.69 %	15.74 %	18,94%
3	Jumlah Kursi	18 Kursi	14 Kursi	9 Kursi	9 Kurs

Sumber: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara.

Berdasarkan data di atas diketahui bahwa suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Jepara turun dari pemilu ke pemilu, walaupun pada pemilu 2014 ada kenaikan tetapi tidak terlalu signifikan karena perolehan kurisnya di DPRD Jepara tetap dengan Pemilu 2009, 9 kursi. Dilihat dari potensi Jepara, ini merupakan sebuah kerugian bagi

---

<sup>45</sup> Akhsin Muktasim, Purwoko dan Muhammad Adnan, Turunnya Suara Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Jepara, dalam <https://media.neliti.com> (14/11/2019)

PPP Jepara sebab Kabupaten Jepara meruapkan basis besar PPP yang selalu menduduki peringkat atas dalam pemilu, selain itu juga masa PPP di Jepara terkenal loyal dalam mendukung dilihat dari jumlah suaranya dan juga sejarahnya diwarnai dengan berbagai intrik dari masa pendukungnya dari saling sindir sampai pada aksi bentrokan.<sup>46</sup>

Pada tahun 2014, jumlah pemilih di Jepara juga menurun. Meski sudah ditetapkan, Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2014 di Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah (Jateng) dulu dikabarkan berubah. Menurunnya jumlah DPT di Jepara tersebut kala itu seiring dengan adanya instruksi dari jajaran KPU pusat agar penyelenggara pemilu yang ada di daerah melakukan lagi penyisiran data pemilih di wilayahnya masing-masing. Berdasarkan keterangan dari Komisioner KPU 2014 Kabupaten Jepara, Musthofa, bahwa perubahan jumlah pemilih dalam DPT yang sudah ditetapkan jajarannya pada Kamis, 12 September 2013 sangat dimungkinkan. Sebab setelah penetapan itu ada beberapa faktor perubahan seperti adanya warga yang meninggal dunia, pindah alamat, beralih status dari TNI/Polri menjadi sipil dan sebaliknya. Kondisi yang terus berubah ini sangat berpengaruh terhadap jumlah DPT hingga pada hari H Pemilu yang dihelat 9 April 2014 mendatang.

Menurut Musthofa saat itu menambahkan bahwa kemungkinan berubahnya DPT juga diperkuat dengan turunnya surat dari KPU Pusat bernomor 644 tahun 2013 yang intinya menginstruksikan jajaran KPU di provinsi maupun kabupaten/kota agar melakukan lagi pemutakhiran data pemilih di wilayahnya masing-masing. Hal ini cukup wajar karena berdasar hasil penyandingan daftar pemilih sementara hasil perbaikan (DPSHP) yang dilakukan jajaran KPU dan data penduduk pemilih potensial pemilu (DP4) Kemendagri menunjukkan terdapat 65 juta lebih data pemilih yang belum sinkron.

Sebagian besar ketidaksinkronan itu, di masa itu juga disebabkan persoalan teknis, yakni jumlah digit Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tidak lengkap. Sebanyak 190.463.184 pemilih berdasarkan DP4 Kemendagri dimutakhirkan menjadi DPSHP oleh KPU dan hanya tinggal 181.140.282 pemilih. Dari

---

<sup>46</sup> *Ibid.*,

jumlah itu, diketahui jika ada 65 juta data pemilih yang belum sinkron karena “bermasalah” dengan data dengan NIK.

Pada Pemilu 2014, jumlah standar dalam NIK adalah 16 digit. Sementara yang terhimpun dalam sistem informasi data pemilih (sidalih) KPU ada yang kurang dari 16 digit sehingga ada lebih dari 16 digit. Bahkan saat itu isu yang mencuat ada yang tanpa NIK. Ketika itu Musthofa ditanya tentang jumlah data pemilih di Jepara yang NIK miliknya tidak sinkron, dan salah satu komisioner KPUD Jepara itu menjawab tidak tahu, sebab data tersebut masih berada di jajaran KPU Provinsi Jawa Tengah.

Pada Pemilu 2014, DPRD Kabupaten Jepara menempatkan 50 orang wakilnya yang tersebar di beberapa fraksi, dengan perolehan suara terbanyak diraih oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.<sup>47</sup> Pada Pemilu 2014, suara kursi DPRD Jepara dari masing-masing partai politik sebagai berikut<sup>48</sup>:

1. PDI Perjuangan	:10
2 Partai Persatuan Pembangunan	:9
3 Partai Gerindra	:8
4 Partai NasDem	:5
5 Partai Kebangkitan Bangsa	:5
6 Partai Golkar	:5
7 Partai Amanat Nasional	:3
8 Partai Keadilan Sejahtera	:2
9 Partai Demokrat	:2
10 Partai Hanura	:1
Jumlah	:50

Karena PDIP muncul sebagai peraih kursi terbanyak pada Pemilu 2014, maka pimpinan DPRD Jepara di periode itu dpegang oleh PDIP. Padahal, pada pemilu-pemilu sebelumnya, pimpinan DPRD Jepara menjadi dominasi PPP. Pada masa inilah, DPRD Jepara mulai bergeser dari “hijau” ke “merah”.

---

<sup>47</sup> KPU Jepara: Penetapan perolehan kursi dan caleg terpilih DPRD Kabupaten Jepara (diakses 29 Juli 2015); Suara Merdeka: Pimpinan Difinitif DPRD Jepara Ditetapkan (diakses 29 Juli 2015)

<sup>48</sup> KPU Jepara

Kondisi berubah ketika Pemilu 2019. Di Pemilu ini, PPP berhasil menggeser PDIP kembali dengan meraih kursi terbanyak. Sebagaimana dilaporkan Ketua KPU Jepara Subchan Zuhri bahwa hasil rapat pleno terbuka KPU Jepara pada Rabu (3/7/2019), di Hotel d'Season Premiere Bandengan Jepara menetapkan 50 nama calon anggota dewan yang akan duduk di kursi DPRD Jepara. Dalam laporannya KPUD Jepara itu, perolehan kursi untuk DPRD Jepara dari masing-masing partai sebagai berikut<sup>49</sup>:

1. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mendapatkan perolehan jatah terbanyak dengan perolehan 10 kursi (119.645 suara).
2. Partai Demokrasi Perjuangan (PDIP) dengan jumlah 8 kursi (112.749 suara).
3. Partai Nasdem dengan perolehan 7 kursi (78.926 suara)
4. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan 6 kursi (76.614 suara).
5. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) mendapatkan perolehan 5 kursi (64.705 suara),
6. Partai Golongan Karya (Golkar) mendapatkan 4 kursi (56.180 suara).
7. Partai keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Indonesia, Partai Amanat Nasional, dan Partai Demokrat masing-masing memperoleh 2 kursi.
8. Partai Berkarya, Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), masing-masing 1 kursi.

Dilihat dari data di atas, PPP pada 2019 muncul sebagai partai yang meraup suara terbanyak karena pada 2019 ini PPP kembali menguasai DPRD Jepara. Dalam struktur pimpinan DPRD Jepara periode 2019-2024, empat pimpinan definitif DPRD Jepara telah ditetapkan, terdiri dari Ketua Imam Zusdi Ghozali (PPP) dan tiga wakil ketua yang masing-masing adalah Junarso (PDIP), Pratikno (Nasdem), dan KH. Nuruddin Amin (PKB).<sup>50</sup> Keempatnya akan memimpin DPRD Kabupaten Jepara hingga berakhirnya masa jabatan tahun 2024. Dengan demikian, PPP pada pemilu 2019 ini kembali memegang pimpinan DPRD Jepara.

---

<sup>49</sup> KPU Jepara

<sup>50</sup> KPU Jepara

Meski demikian, kekuatan PPP sekarang tidak lagi dominan di Jepara. Memang partai berlambang Ka'bah ini sekarang berhasil menguasai kursi DPRD Jepara, namun pengaruhnya di publik Jepara tidak sekuat dulu. Pendukung PPP yang loyal dan banyak tidak lantas membuat PPP berhasil mempertahankan absolutitas dominasinya di Jepara. Alih-alih bertahan, absolutisme dominasi PPP di Jepara mulai merosot pada masa-masa belakangan ini. Apalagi sekarang partai-partai baru terus bermunculan yang membuat warga Jepara, khususnya masyarakat Islam Jepara yang dulunya sangat fanatik PPP, banyak beralih ke partai-partai lain yang muncul belakangan. PPP yang di zaman Orde Baru dan awal Reformasi menjadi primadona masyarakat Jepara, sekarang pamornya sudah mulai memudar.

Tentu saja ada beberapa faktor kenapa PPP tidak lagi kuat dominasinya dalam panggung politik Jepara. Di antara faktor yang membuat PPP semakin merosot tingkat dominasinya di Jepara adalah karena adanya sistem multipartai. Hadirnya banyak partai membuat masyarakat Jepara menjadi mempunyai banyak alternatif untuk memilih, baik itu memilih berdasarkan ideologis, isu yang diangkat, ataupun memperhitungkan faktor rasional choice (untung rugi) dalam memilih partai politik.<sup>51</sup> Selain itu dengan munculnya partai-partai dengan dukungan dana yang besar membuat partai yang minim dana atau pas-pasan akan berpeluang kalah, karena terjadi pergeseran perilaku para pemilih bukan hanya karena kedekatan ideologis tapi juga berdasarkan kepentingan pragmatis. Menguatnya pragmatism politik di berbagai daerah, termasuk di Jepara, akan membuat para pemilih lebih tergiur dengan praktek politik uang.<sup>52</sup> Dalam hal ini menjual isu Islam, sebagaimana yang dilakukan PPP di masa Orde Baru atau awal-awal Reformasi sudah mulai agak tidak laku di Jepara.

Faktor berikutnya adalah persoalan internal yang melanda PPP. Di PPP sendiri sebenarnya ada beberapa kader yang pindah ke partai lain karena tidak dicalonkan dan gagal dalam pemilu. Para kader

---

<sup>51</sup> Akhsin Muktasim, Purwoko dan Muhammad Adnan, Turunnya Suara Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Jepara, dalam <https://media.neliti.com> (14/11/2019).

<sup>52</sup> *Ibid*

PPP yang memutuskan untuk pindah ke partai lain iuni karena memandang partai lain lebih baik dijadikan kendaraan politik.<sup>53</sup> Di sisi lain para kader PPP yang terpilih berhasil menjadi anggota legislatif cenderung lupa dan tidak memperhatikan warga PPP.<sup>54</sup>

Namun persoalan itu bukan tanpa sebab. Para kader yang duduk di DPRD menjadi kurang memperhatikan warga PPP disebabkan oleh biaya operasional kegiatan rutinan seperti pengajian, idaroh dan bantuan-bantuan lainnya.<sup>55</sup> Selain hal tersebut, masalah internal PPP Jepara berupa kurangnya adanya kader baru. Kaderisasi PPP di Jepara tidak berjalan dengan baik. Salah satu sebabnya adalah kurang aktifnya kepengurusan kepartaian PPP dalam menjalankan kegiatan politiknya tidak seperti dulu yang selalu aktif dan rutin dalam menjalankan kegiatan partai maupun kegiatan keagamaan.<sup>56</sup> Karenanya kurang berjalannya kaderisasi inilah PPP hingga kini masih saja didominasi generasi tua dan tradisional sehingga membuat suara PPP di Jepara mengalami penurunan meski masih tetap sebagai terbesar.

Lalu faktor berikutnya adalah karena terjadinya pergeseran paradigma pemilih.<sup>57</sup> Jika di masa Orde Baru PPP sangat mengandalkan ideologi (Islam) sebagai bahan kampanye, maka sekarang cara itu nampak sudah tidak efektif lagi. Di kalangan para simpatisan PPP sendiri sudah tidak laku lagi kalau 'jualan' ideologi. Karena masyarakat Jepara, seiring dengan perubahan pola pikirnya, mulai paham bahwa partai politik sejatinya bukan sepenuhnya representasi ideologi, tapi representasi kepentingan masing-masing orang.<sup>58</sup>

Hal itu ditambah dengan kultur masyarakat Jepara belakangan yang semakin pragmatis dan realistis dalam berpolitik. Dengan pragmatism masyarakat ini, maka yang punya peluang besar jadi atau terpilih adalah sosok yang punya kekuatan finansial yang baik, dan

---

<sup>53</sup> *Ibid*

<sup>54</sup> *Ibid*

<sup>55</sup> *Ibid*

<sup>56</sup> *Ibid.*

<sup>57</sup> Wawancara dengan Nuruddin Amin (Wakil ketua DPRD Jepara dan ketua DPC PKB Jepara) (16/10/2019).

<sup>58</sup> *Ibid.*

tidak lagi menggunakan ideologi.<sup>59</sup> Dengan kutanya pragmatism politik ini pula, mereka merasa di PPP sudah tidak menguntungkan akhirnya pindah ke partai lain.<sup>60</sup>

Selain itu, terkait dengan masalah ideologi itu, Islam sebagai ideologi untuk menarik suara dari masyarakat sekarang mulai tidak mujarab lagi. Perbedaan kental ideologi antara Islam dan nasionalis di Jepara sekarang mulai luruh. Jika di zaman Orde Baru atau awal-awal Reformasi masyarakat Islam yang memilih partai nasionalis akan dikesankan sangat tabu, maka sekarang kesan itu sudah mulai tidak berlaku. Yang terjadi justru sebaliknya bahwa antara partai-partai Islam seperti PPP tidak segan lagi untuk berkoalisi dengan partai nasionalis. Hal ini terjadi di level provinsi maupun nasional.

Di elevel nasional, jelas telah terjadi kolaisi antara Jokowi sebagai tokoh nasionalis dan KH. Ma'ruf Amin sebagai representasi tokoh Islam. Begitu juga di Jawa Tengah. Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pramowo sebagai kader PDIP berkoalisi dengan Taj Yasin sebagai kader PPP. Di Jepara sendiri, Ahmad Marzuqi yang noatbene sebagai ketua DPC PPP Jepara, telah dijagokan oleh PDIP untuk menjadi bupati Jepara dengan wakilnya Andi Kristiadi yang merupakan kader PDIP dalam Pilkada Jepara pada 2017. Pada Pilkada 2017 ini sungguh unik. Marzuqi yang notabene sebagai ketua PPP Jepara justru bersedia dilamar oleh PDIP sementara PPP Jepara sendiris ecara struktural malah mendukung lawan Mrazuqi dalam Pilkada, Subroto.

Karena itulah, pada Pilkada 2017 itu muncul wacana bahwa Marzuqi seperti 'anak buangan' yang dibuang oleh partainya sendiri lalu dipungut oleh PDIP. Namun pengaruh Marzuqi secara individu di Jepara memang kuat. Terbukti dalam Pilkada Jepara 2017 itu ia berhasil sebagai pemenang. Dengan kemenangannya ini, Marzuqi bisa berkuasa sebagai Bupati Jepara untuk kedua kalinya. Namun sayang pada 2019 ini, Marzuqi telah tertangkap KPK dalam kasus dugaan suap terhadap hakim Pengadilan Negeri (PN) Semarang Lasito, sehingga dirinya tidak bisa melanjutkan pemerintahannya yang baru akan berakhir pada 2020 mendatang. Sebagai gantinya, kursi Bipati Jepara pada 2019 ini diisi oleh wakil bupati, Andi Kristiandi.

---

<sup>59</sup> *Ibid.*

<sup>60</sup> Wawancara dengan Muslih tokoh senior PPP (16/10/2019).

Leburnya sekat-sekat ideologi antara relijisu versus nasionalis ini juga berpengaruh terhadap perilaku pemilih muslim di Jepara. Banyak umat Islam Jepara yang juga me jadi simpatisan PDIP. Bahkan sekarang PDIP di Jepara menggeser partai bercorak Islam lainnya seperti PKB, PAN, PKS dan PBB padahal di waktu dulu PDI ini partai minoritas di Jepara. Bahkan PDIP di Jepara ini semakin menguat permainan politik kader PDIP yang sekarang menjadi Bupati (Plt) Jepara, Dian Kristiandi yang terbilang cerdas, di mana kader PDIP Jepara itu berhasil mengendalikan para PNS di desa-desa.<sup>61</sup>

Basis massa PPP yang masih loyal dan fanatik karena alasan ideologis (Islam) hanya ada di kalangan orang-orang tua yang usianya 40 ke atas.<sup>62</sup> Sementara anak-anak muda di Jepara, sudah banyak yang berubah di mana mereka relative independen dan sulit diikat dengan semangat ideologi Islam karenanya para anak muda ini di Jepara ini, meskipun terbilang santri atau pemuda Islam, banyak yang bergabung dengan partai-partai nasionalis.<sup>63</sup> Di antara mereka ada yang menjadi kader Demokrat, Nasdem, PDI-P, Golkar, Gerindra dan sejenisnya. M. Latifun misalnya, seorang yang berlatar belakang santri dan pengurus PCNU Jepara, kini menjadi ketua DPC Demokrat dan anggota DPRD Jepara. Begitu juga anak-anak muda lainnya yang berkatar belakang santri juga banyak tersebar di partai-partai nasionalis lain seperti Naseem, Gerindra, Golkar bahkan PDIP.

Di berbagai daerah yang ada di Jepara kini mulai sulit dipetakan, karena kondisinya relative cair. Daerah-daerah yang dulu menjadi basis PPP pun berubah menjadi basisnya PDIP atau PKB. Sampai saat ini, kata Nuruddin Amin, kecamatan-kecamatan di Jepara yang masih kuat didominasi PPP adalah Bangsri, Bate Alit, Kedung dan Mayong.<sup>64</sup> Hal yang hampir sama diungkapkan oleh M. Latifun bahwa pada pemilu 2019 PPP masih kuat di dapil 5 yaitu Pecangaan,

---

<sup>61</sup> Wawancara dengan M. Latifun, anggota DPRD Jepara dan pimpinan DPC Partai Demokrat Jepara (16/10/2019).

<sup>62</sup> Wawancara dengan Muslih tokoh senior PPP (16/10/2019); Wawancara dengan M. Latifun, anggota DPRD Jepara dan pimpinan DPC Partai Demokrat Jepara (16/10/2019).

<sup>63</sup> Wawancara dengan Muslih tokoh senior PPP (16/10/2019).

<sup>64</sup> Wawancara dengan Nuruddin Amin (Wakil ketua DPRD Jepara dan ketua DPC PKB Jepara) (16/10/2019)

Bate Alit dan Kalinyamatan, sdan meskipun masih menang, PPP di Jepara sudah berkurang pengaruhnya.<sup>65</sup> Lalu menurut Muslih, salah seorang tokoh senior PPP, pengaruh PPP di Jepara sesungguhnya masih kuat di berbagai desa dan kecamatan seperti Donorojo, Nalumsari dan Bangsri.<sup>66</sup> Sementara di kecamatan-kecamatan lain proporsinya sudah merata.<sup>67</sup> Di mana di berbagai kecamatan dan desa-desa lainnya yang ada di Jepara, kekuatan PPP sudah tidak lagi kuat. Di kecamatan-kecamatan yang telah menjadi basisnya tersebut, seperti Bangsri, Mayong, Batealit, Pecangaan dan Kalinyamatan, dominasi PPP juga tidak sekuat dulu. Artinya, secara umum, meski tetap sebagai partai pemenang, pamor PPP di Jepara sekarang telah memudar terutama di mata para anak-anak muda.

## Penutup

Berdasarkan penjelasan di atas bisa disimpulkan bahwa PPP yang merupakan partai hasil fusi dari partai-partai Islam di zaman Orde Baru pernah menjadi primadona di Jepara. Masyarakat Jepara dikenal sangat fanatik terhadap partai berlambang Ka'bah ini. Masyarakat Jepara begitu fanatik terhadap PPP sehingga menjadikan partai ini sebagai kendaraan politiknya karena alasan ideologis: Islam. Isu-isu keislaman menjadi sangat laku di Jepara dan karenanya sangat efektif untuk menarik dukungan masyarakat. Puncak kejayaan PPP Jepara adalah tahun 1999, di mana saat itu partai ini berhasil meraup suara terbanyak dengan 18 kursi. Akibat fanatisme yang begitu kuat itu, simpatisan PPP sering terlibat ketegangan dan konflik dengan simpatisan partai lain, termasuk dengan PKB. Karenanya, fanatisme politik ini sempat mengoyak hubungan sosial masyarakat Jepara.

Namun pada pemilu-pemilu berikutnya, dan belakangan ini, superioritas PPP di Jepara secara perlahan mulai merosot. Ini artinya belakangan ini masyarakat Jepara sudah banyak yang tidak lagi fanatik terhadap PPP. Meski PPP sekarang masih menjadi pemenang namun

---

<sup>65</sup> Wawancara dengan M. Latifun, anggota DPRD Jepara dan pimpinan DPC Partai Demokrat Jepara (16/10/2019).

<sup>66</sup> Wawancara dengan Muslih tokoh senior PPP (16/10/2019).

<sup>67</sup> Wawancara dengan Nuruddin Amin (Wakil ketua DPRD Jepara dan ketua DPC PKB Jepara) (16/10/2019); Wawancara dengan Zainal Arifin, Rais Syuriyah NU Ranting Desa Sekuro-Mlonggo (17/10/2019).

dominasinya tidak sekuat dulu. Di sisi lain, partai-partai nasionalis, terutama PDI-P yang dulunya menjadi partai minoritas, sekarang mulai menguat dan turut menggerogoti basi-basis PPP di Jepara. Ada beberapa faktor yang disinyalir menjadi penyebab menurunnya fanatisme masyarakat Jepara terhadap PPP. Di antara faktor itu adalah terjadinya perubahan paradigm masyarakat Jepara, terutama di kalangan anak muda Jepara.

Masyarakat Jepara secara umum tidak lagi percaya dengan jargon-jargon ideologis termasuk jargon-jargon Islam. Sebaliknya, masyarakat Jepara dalam berpolitik saat ini cenderung pragmatis. Jargon-jargon atau isu-isu keislaman sekarang ini masih berlaku hanya di kalangan orang-orang tua. Kalangan anak muda lebih tertarik dengan tawaran-tawaran politik yang lebih realistis dan pragmatis. Kemudian faktor berikutnya adalah adanya partai-partai baru yang bermunculan sebagai konsekuensi dari sistem multi partai. Dengan hadirnya partai yang semakin banyak itu, membuat masyarakat Jepara semakin leluasa untuk menentukan pilihannya. Dan tak kalah pentingnya adalah terjadinya persoalan internal di kalangan PPP Jepara sendiri seperti tidak loyalitasnya kader dan kurang berjalannya sistem kaderisasi di tubuh PPP. Dengan merosotnya dominasi PPP itulah, kekuatan politik secara umum cenderung merata di berbagai daerah yang ada di Jepara.

### Daftar Pustaka

- Bennet, Clinton, *Moslem and Modernity: An Introduction to the Issues and Debates*, London and New York: Continuum, 2005.
- Feillard, Andrée, *NU vis-à-vis Negara: Pencarian Isi, Bentuk dan Makna*, (Terj.), Lesmana, Yogyakarta: LKiS, 2013.
- Firmanzah, *Persaingan, Legitimasi Kekuasaan dan Marketing Politik: Pembelajaran Politik Pemilu 2009*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2010.
- Muhibbuddin, Muhammad, *R.M.P.Sosrokartono: Kisah Hidup dan Ajaran-Ajarannya*, Yogyakarta: Araska, 2019.
- Muktasim, Akhsin, Purwoko dan Muhammad Adnan, *Turunnya Suara Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Jepara*, dalam <https://media.neliti.com> (14/11/2019).

- Schiller, Jim, “Civil society in Jepara; Fractious but inclusive” dalam (Ed.) Henk Schulte Nordholt and Gerry van Klinken, *Renegotiating Boundaries Local politics in post Soeharto Indonesia*, (Leiden, KITLV Press, 2007)
- Suyami, *Kearifan Lokal di Lingkungan Masyarakat Nelayan Jepara Jawa Tengah*, Yogyakarta: kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, 2002
- Wawancara dengan Kiai Muslih, tokoh senior PPP (16/10/2019)
- Wawancara dengan KH. Nuruddin Amin S.A.g, ketua DPC PKB dan Wakil Ketua DPRD Jepara (16/10/2019)
- Wawancara dengan M. Latifun SSn, ST, MT., ketua DPC Partai Demokrat dan anggota DPRD Jepara (16/10/2019).
- Wawancara dengan KH. Zainal Arifin, Rais Syuriah NU Ranting Desa Sekuro-Mlonggo (17/10/2019).
- Wawancara dengan Andang Wahyu Triyanto, Ketua DPC PDI-P Kab. Jepara dan Anggota DPRD Jawa Tengah (17/10/2019)
- Wawancara dengan KH. Abdul Wahab, Ketua PC LDNU Kab. Jepara (18/10/2019)
- Wawancara dengan Warga Jepara yang keberatan diungkapkan namanya: Wawancara dengan MM (19 April 2017), Wawancara dengan ADH (20 April 2017), Wawancara dengan MQ (20 April 2017).